

2021

LAPORAN KOMPILASI

HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP

PADA 31 (TIGA PULUH SATU) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH



IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktifitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja Pemerintah.

Evaluasi Implementasi SAKIP di Pemerintahan Kota Payakumbuh merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan baik secara mandiri (Self Evaluation) maupun dilakukan oleh APIP, untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja bagi manajemen pemerintahan, hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh tanggal 4 Januari 2016 yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap 31 OPD di Kota Payakumbuh pada tahun 2021, rata-rata mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Nilai merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dari masing-masing OPD.

Dari hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP di 31 OPD Kota Payakumbuh, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk Implementasi SAKIP, melalui Laporan Hasil Evaluasi Individu masing-masing Perangkat Daerah, jika Walikota Payakumbuh sependapat untuk perbaikan Implementasi SAKIP Kota Payakumbuh, kami merekomendasikan:

1. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.

2. Memanfaatkan hasil penilaian SAKIP sebagai dasar kebijakan reward dan punishment, dalam:
 - a. Kebijakan pembinaan bidang sumber daya manusia yaitu:
 - Sebagai dasar penilaian SKP Kepala OPD
 - Sebagai pertimbangan promosi dan mutasi
 - b. Kebijakan bidang perencanaan dan penganggaran yaitu:
 - Sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran penyusunan RKPD dan Reviu RPJMD.
 - Sebagai dasar TAPD dalam menentukan alokasi anggaran OPD
 - c. Kebijakan pengawasan yaitu:
 - Sebagai dasar penyusunan analisis dan peta resiko
 - Sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan (jakwas) untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Dalam tahun 2021, OPD telah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap rekomendasi hasil evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2020, hal ini ditunjukkan adanya peningkatan nilai evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2021.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2021 pada 31 OPD ini disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH
ANDRI NARWAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19730319 199308 1 001

Tebusan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

Dasar hukum evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Payakumbuh tanggal 4 Januari 2016;
3. Surat Tugas Inspektur Kota Payakumbuh Nomor : 700/42/Ins-Pyk/2021,700/43/Ins-Pyk/2021,700/44/Ins-Pyk/2021, 700/45/Ins-Pyk/2021,700/46/Ins-Pyk/2021,700/47/Ins-Pyk/2021 tentang Evaluasi SAKIP pada 31 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2021.

1. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang AKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh 31 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong masing-masing OPD secara konsisten meningkatkan AKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

2. TUJUAN EVALUASI

Tujuan evaluasi atas Implementasi SAKIP ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang Implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat atas Implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;

3. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP, meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan;

4. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas AKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan penilaian

dengan metodologi ini menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) dengan komponen sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30
2.	Pengukuran Kinerja	25
3.	Pelaporan Kinerja	15
4.	Evaluasi Internal	10
5.	Capaian Kinerja	20
Total		100

Hasil evaluasi Sistem AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dengan parameter sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sitem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
			tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar.
7.	D	>0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

5. GAMBARAN UMUM OBJEK EVALUASI

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah OPD yang menjadi Objek Evaluasi sebanyak 31 OPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Badan Keuangan Daerah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Pertanian
14. Dinas P3A dan P2KB
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
17. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
18. Dinas Koperasi dan UKM
19. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
20. Dinas Pendidikan
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

23. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
24. Dinas Komunikasi dan Informatika
25. Dinas Ketahanan Pangan
26. Kesbangpol
27. Kecamatan Payakumbuh Utara
28. Kecamatan Payakumbuh Timur
29. Kecamatan Payakumbuh Barat
30. Kecamatan Payakumbuh Selatan
31. Kecamatan Lampasi Tigo Nagari

6. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP

Terkait dengan AKIP Tahun 2021, 31 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan penerapan AKIP di tingkat OPD beserta inovasi yang dianggap perlu.

Dokumen-dokumen yang menggambarkan AKIP di 31 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. OPD telah mereviu dokumen RENSTRA Tahun 2017 - 2022.
2. OPD telah memiliki dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan.
3. OPD telah memiliki Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 - 2022.
4. OPD telah memiliki dokumen Perjanjian Kinerja.
5. OPD telah memiliki dokumen Laporan Kinerja Instansi.
6. Evaluasi Implementasi SAKIP 31 OPD telah dilakukan setiap tahun.
7. Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja telah dibuat.
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi telah dibuat.
9. Dokumen SOP pengumpulan data kinerja telah dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah.
10. Laporan Evaluasi Program telah dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka transparansi, dokumen-dokumen SAKIP tersebut sebagian besar telah dipublikasikan melalui website resmi masing-masing OPD.

BAB II

HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Dari hasil evaluasi, sebanyak 31 OPD terlampir. Rincian hasil evaluasi per komponen kinerja 31 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebagai berikut :

A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja pada 31 OPD, rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 30,00. Dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategis

Hasil evaluasi atas Perencanaan Strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), hasil reviu RPJMD/Renstra dan dokumen pendukung lainnya pada 31 OPD, rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 10,00, dengan parameter penilaian sebagai berikut :

a. Pemenuhan Renstra

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Renstra pada 31 OPD, rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 2,00.

b. Kualitas Renstra

Hasil evaluasi atas Kualitas Renstra pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 5,00.

c. Implementasi Renstra

Hasil evaluasi atas Renstra pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 3,00.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi Perencanaan Kinerja Tahunan pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 20,00, dengan parameter penilaian sebagai berikut :

a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan memperlihatkan capaian kinerja pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 4,00.

b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan memperlihatkan capaian kinerja pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 10,00.

c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil evaluasi atas Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 6,00.

B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 25,00. Dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pengukuran

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Pengukuran pada 31 OPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 5,00.

2. Kualitas Pengukuran

Hasil evaluasi atas Kualitas Pengukuran pada 31 OPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 12,50.

3. Implementasi Pengukuran

Hasil evaluasi atas Pengukuran pada 31 OPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 7,50.

C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 15,00. Dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pelaporan

Hasil evaluasi atas pemenuhan pelaporan pada 31 OPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 3,00.

2. Penyajian Infomasi Kinerja

Hasil evaluasi atas Penyajian Infomasi Kinerja pada 31 OPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau

mendekati nilai maksimal 7,50.

3. Pemanfaatan Infomasi Kinerja

Hasil evaluasi atas Pemanfaatan Infomasi Kinerja pada 31 OPD rata-rata Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 4,50.

D. EVALUASI ATAS EVALUASI INTERNAL

Hasil evaluasi atas Evaluasi Kinerja internal pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 10,00,. Dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan Evaluasi

Hasil evaluasi atas Pemenuhan Evaluasi pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 2,00.

2. Kualitas Evaluasi

Hasil evaluasi atas Kualitas Evaluasi pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 5,00.

3. Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi atas Pemanfaatan Evaluasi pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 3,00.

E. EVALUASI ATAS PENCAPAIAN SASARAN KINERJA ORGANISASI

Hasil evaluasi atas Pencapaian Kinerja pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 20,00,. Dengan rincian masing-masing sub komponen sebagai berikut :

1. Kinerja yang Dilaporkan (Output)

Hasil evaluasi atas Kinerja yang Dilaporkan (Output) pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 7,50.

2. Kinerja yang Dilaporkan (Outcome)

Hasil evaluasi atas Kinerja yang Dilaporkan (Outcome) pada 31 OPD rata-rata OPD telah memperoleh nilai maksimal atau mendekati nilai maksimal 12,50.

Dari hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP pada 31 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, kami telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk implementasi SAKIP, melalui Laporan Hasil Evaluasi individu ke masing-masing OPD, jika Walikota Payakumbuh sependapat untuk perbaikan implementasi SAKIP Kota Payakumbuh, kami merekomendasikan :

1. Memerintahkan Kepala OPD untuk memperbaiki perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
2. Memanfaatkan hasil penilaian SAKIP sebagai dasar kebijakan reward dan punishment, dalam :
 - a. Kebijakan pembinaan bidang sumber daya manusia yaitu:
 - Sebagai dasar penilaian SKP Kepala OPD
 - Sebagai pertimbangan promosi dan mutasi
 - b. Kebijakan bidang perencanaan dan penganggaran yaitu:
 - Sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran, penyusunan RKPD dan reviu RPJMD
 - Sebagai dasar TAPD dalam menentukan alokasi anggaran OPD
 - c. Kebijakan pengawasan yaitu:
 - Sebagai dasar penyusunan analisis dan peta risiko
 - Sebagai dasar penyusunan kebijakan pengawasan (jakwas) untuk penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).



**Hasil Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Perangkat Daerah se Kota Payakumbuh
Tahun 2021**

NO	SKPD	HASIL EVALUASI		
		HASIL		
		HASIL	KATEGORI	KETERANGAN
1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	91.77	AA	Sangat Memuaskan
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	91.65	AA	Sangat Memuaskan
3	Dinas Pendidikan	91.32	AA	Sangat Memuaskan
4	Inspektorat	91.00	AA	Sangat Memuaskan
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90.35	AA	Sangat Memuaskan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	90.22	AA	Sangat Memuaskan
7	Sekretariat Daerah	89.91	A	Memuaskan
8	Badan Keuangan Daerah	89.20	A	Memuaskan
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89.11	A	Memuaskan
10	Dinas Pertanian	89.06	A	Memuaskan
11	Dinas Kesehatan	89.02	A	Memuaskan
12	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	88.59	A	Memuaskan
13	Kecamatan Lampasi Tigo Nagari	88.57	A	Memuaskan
14	Kesbangpol	88.48	A	Memuaskan
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88.40	A	Memuaskan
16	Dinas Perhubungan	88.29	A	Memuaskan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	88.14	A	Memuaskan
18	Dinas Ketahanan Pangan	88.12	A	Memuaskan
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	88.09	A	Memuaskan
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	87.12	A	Memuaskan
21	Sekretariat DPRD	87.07	A	Memuaskan
22	Kecamatan Payakumbuh Timur	87.05	A	Memuaskan
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	87.02	A	Memuaskan
24	Kecamatan Payakumbuh Selatan	87.01	A	Memuaskan
25	Dinas Lingkungan Hidup	86.92	A	Memuaskan
26	Dinas Koperasi dan UKM	86.46	A	Memuaskan
27	Dinas P3A dan P2KB	85.79	A	Memuaskan
28	Kecamatan Payakumbuh Utara	85.21	A	Memuaskan
29	Kecamatan Payakumbuh Barat	85.16	A	Memuaskan
30	Dinas Sosial	84.24	A	Memuaskan
31	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	83.47	A	Memuaskan

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH

ANDRI NARWAN, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19730319 199308 1 001